

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT sehingga Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 merupakan bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tema, prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur serta isu-isu strategis Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Paser tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2024. Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2024 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Tanjung Aru, 13 Juli 2023

Camat Tanjung Harapan,

CAMAT



H. Sudarsono, SP. MP
NIP. 19700424 199803 1 010

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1 - 3
1.2 Landasan Hukum.....	3 - 5
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5 - 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Rentra SKPD	7 - 15
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan SKPD.....	16 - 21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	21 - 24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24 - 37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	38 - 40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	40 - 41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan	42 - 44
4.2 Matriks Pendanaan	45 – 53
BABV PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2022.....	8 – 9
Tabel TC– 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Rentstra SKPD s/d Tahun 2023	12 – 15
Tabel 2..2.1 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022	18 – 19
Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tanjung Harapan.....	20 – 21
Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2024 Kantor Camat Tanjung Harapan.....	25 – 36
Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	37
Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	47 – 53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja. Renja PD adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Tanjung Harapan secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten, propinsi dan pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan Renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan

agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

2. Penyusunan Rancangan

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah “tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah”. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan RKPD.

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

4. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses Akhir Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

5. Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser menyampaikan seluruh Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2024 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Tanjung Harapan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Paser.

Pada penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta

prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah telah dilakukan.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Dan pada akhir Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja Kecamatan Tanjung Harapan 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 Nomor ..);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Tanjung Harapan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kabupaten Paser Tahun 2024 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2021-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) Pelaksanaan pelayanan perangkat;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan Renja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Racangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
 DAERAH**

4.1 Program dan Kegiatan

4.2 Matrik Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Kecamatan Tanjung Harapan sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Tanjung Harapan melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Kecamatan Tanjung Harapan; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra SKPD

Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/ PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Harapan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tanjung Harapan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah dicapai atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjung Harapan selama Tahun 2022 serta perkiraan Target Anggaran Berikutnya.

Sebagaimana Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi atau diukur dalam pelaksanaannya. Pengukuran Kinerja adalah Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian Realisasi, kemajuan dan kendala yang di hadapi dalam rangka pencapaian Visi dan misi, supaya dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efesiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efesiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Berikut data capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2022.

PD Kecamatan Tanjung Harapan telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2022, bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022, dan realisasi renstra PD Kecamatan Tanjung Harapan yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan tahun berjalan.

Tabel 2.1.1
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2022

NO	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Kantor Camat Tanjung Harapan		3.743.101.340	3.590.922.748	95,93	96,00
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.820.000	11.820.000	100	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.294.542.440	2.150.620.068	93,73	94
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.424.740	150.413.030	99,99	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.514.500	27.514.500	100	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.291.110	36.900.380	92,93	95
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.606.780	18.606.780	100	100
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	35.820.000	35.820.000	100	100

		Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.560.000	6.560.000	100	100
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	346.712.500	346.712.500	100	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.012.500	59.247.500	98,73	99
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	121.757.500	118.319.500	97,18	98
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	632.430.000	630.997.760	99,77	100
		Jumlah	3.743.101.340	3.590.922.748	95,93	

Berdasarkan hasil Evaluasi, Program dan kegiatan tahun 2022 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan rata-rata mencapai 100%. Namun masih ada beberapa Program dan Kegiatan yang pencapaian Realisasi Keuangan dan Indikator Kinerjanya dibawah 100%. Pada Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa terdapat penambahan Anggaran Alokasi Khusus Perlindungan Sosial (PERLINSOS) kepada masyarakat akibat dampak kenaikan BBM yang terjadi pada Tahun 2022. Adapun beberapa hal yang menjadi evaluasi bagi PD Kecamatan Tanjung Harapan antara lain :

2.1.1 Faktor-faktor penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian target kinerja

Secara umum tidak ada hambatan atau kendala yang berarti yang dihadapi PD Kecamatan Tanjung Harapan dalam pencapaian target kinerja dan keuangan.

Yang terjadi hanya ada beberapa kegiatan yang pada realisasinya mengalami perubahan jumlah output (keluaran).

Selain itu juga terdapat beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan anggaran dikarenakan anggaran yang tersedia digeser untuk membiayai program dan kegiatan lain sehingga anggaran yang bersangkutan di nolkan.

2.1.2 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.

Implementasi atau dampak langsung yang timbul dari pencapaian target realisasi capaian kinerja terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/Kelurahan
- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur pemerintah
- Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas terkait
- Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- Meningkatnya Percepatan Pembangunan Kecamatan
-

2.1.3 Kebijakan untuk menindaklanjuti kegagalan pencapaian Target

Adapun Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang dapat dilakukan untuk pencapaian Target Kinerja program / kegiatan antara lain:

- Lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Melakukan Perencanaan dan Penganggaran yang lebih matang
- Mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya saran dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kantor.
- Melakukan efesiensi serta efektifitas penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.

- Evaluasi dan Estimasi serapan anggaran secara berkala sebagai bahan pertimbangan saat penyusunan anggaran perubahan ditahun berjalan.
- Perlu adanya penambahan personil khususnya pada sub bagian program dan keuangan
- Perlu adanya pembinaan dan peningkatan ketrampilan serta kompetensi Aparatur Kecamatan

Rincian ikhtisar realisasi anggaran target kinerja keuangan pada Kantor Kecamatan Tanjung Harapan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Tc-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022
Kantor Kecamatan Tanjung Harapan

Nama PD : Kantor Kecamatan Tanjung Harapan

kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian kinerja renstra SKPD tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target & realisasi Kinerja Prog dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu/n-2)			Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Perkiraan Real Capaian Target program/kegiatan renstra SKPD s/d dengan Tahun 2023	Kode
									Target Renja SKPD (Tahun n-2) 2022	Realisasi Renja SKPD (Tahun n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					URUSAN KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
7	01	001			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	82	-	82	100	121%	70	15	21,4%
7	01	001	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja SKPD	-	-	-	-	-	74	-	%
						Persentase capaian sasaran strategis perangkat daerah	87%	-	87 %	80 %	91,9%	87	-	%
						Persentase ketepatan tahapan penyusunan	100%	-	100 %	85 %	85%	100	-	%

kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian kinerja renstra SKPD tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target & realisasi Kinerja Prog dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu/n-2)			Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Perkiraan Real Capaian Target program/kegiatan renstra SKPD s/d dengan Tahun 2023	Kode
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						dokumen perencanaan PD								
7	01	001	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase LHP nihil	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	0%	%
7	01	001	2	05	Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	0%	%
7	01	001	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	100 %	%	100 %	80 %	80%	100 %	25 %	25%
7	01	001	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	100 %	100 %	57,6 %	57,6%	100 %	25 %	%
7	01	001	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	34%	-	34 %	34 %	100%	45 %	0 %	%
7	01	002			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80	-	80	78,93	98,6%	80 %	10 %	%

kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian kinerja renstra SKPD tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target & realisasi Kinerja Prog dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu/n-2)			Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Perkiraan Real Capaian Target program/kegiatan renstra SKPD s/d dengan Tahun 2023	Kode
									Target Renja SKPD (Tahun n-2) 2022	Realisasi Renja SKPD (Tahun n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	002	2	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	25%	25%
7	01	002	2	02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	-	100%	100%	100%	100%	20%	20%
7	01	003			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16,6%	16,6%
7	01	003	2	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	33%	33%
7	01	004			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	50%	-	50%	50%	100%	50%	%	%

kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian kinerja renstra SKPD tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target & realisasi Kinerja Prog dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu/n-2)			Target Program Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Perkiraan Real Capaian Target program/kegiatan renstra SKPD s/d dengan Tahun 2023	Kode
									Target Renja SKPD (Tahun n-2) 2022	Realisasi Renja SKPD (Tahun n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	004	2	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
7	01	005			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	50%	100%	75%	75%	100%	20%	20%
7	01	005	2	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	7 Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	100%	20%	20%
7	01	006			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan LKP kepala desa tepat waktu	100%	75%	100%	90%	90%	100%	0%	0%
7	01	006	2	01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	7 Desa	-	7 Desa	7 Desa	100%	7 Desa	5 Desa	75%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

PD Kecamatan Tanjung Harapan yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Tanjung Harapan dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (Input), keluaran (output), hasil (Outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-Indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator kinerja pelayanan Kecamatan Tanjung Harapan dari 6 (enam) Program adalah sebagai berikut:

2.2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Kinerja Program :

- Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat

Indikator Kinerja Kegiatan :

- Persentase Ketepatan waktu dan tahapan Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD
- Persentase Temuan ditindak lanjuti
- Persentase LHP Nihil
- Persentase Rata-rata capaian IKI dengan nilai ≤ 80
- Presentase Pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik
- Presentase Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan

- Persentase Inventaris Barang dalam kondisi baik
- Persentase barang inventaris Peralatan dan Mesin dalam kondisi baik.

Indikator Kinerja Sub Kegiatan :

- Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah
- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisaar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
- Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerapan Bangunan Kantor yang disediakan
- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Jenis Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.
- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
- Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara

2.2.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Program :

- Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Indikator Kegiatan :

- Presentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada Camat

Indikator Sub. Kegiatan :

- Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait.
- Jumlah Dokumen peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Jumlah Laporan Fasilitas percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan
- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayan Umum
- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dimplementasikan

2.2.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator Program:

- Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan dengan baik
- Tingkat Pertumbuhan usaha/Kelompok usaha baru

Indikator Kegiatan

- Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana

Indikator Sub Kegiatan

- Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2.2.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Indikator Program

- Persentase Penurunan Kasus Gangguan Ketertiban dan Keamanan

Indikator Kegiatan

- Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase Penyelenggaraan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Sub Kegiatan

- Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Indonesia.

2.2.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Indikator Program

- Persentase Kasus Konflik Sosial yang tertangani/terselesaikan di Wilayah Kecamatan

Indikator Kegiatan

- Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator Sub Kegiatan

- Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan nasional.
- Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

2.2.6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Indikator Program

- Persentase Desa yang menyampaikan LKP Desa Tepat Waktu

Indikator Kegiatan

- Jumlah Desa yang difasilitasi

Indikator Sub Kegiatan

- Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peralatan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

- Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing disajikan dalam tabel sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA %
		TARGET	REALISASI	
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	B (61,20)
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 %	82 %	102,5
3. Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Angka Kriminalitas	52 %	47,5 %	91,34
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	8 %	2,19 %	27,37
RATA-RATA CAPAIAN IKU				70,60

Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Tanjung Harapan dapat dilihat sebagaimana Tabel T.C.30 sebagai berikut :

Tabel TC-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM/ Standar Nasion al	TARGET IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kriteria mutu pelayanan atas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	-	-	
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang selesai Tepat Waktu			90%	90%	100%	92%	100%	100%	-	-	
3	Persentase Surat Permohonan Pelayanan Perijinan yang selesai Tepat Waktu			90%	90%	90%	100%	98%	100%	-	-	
4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan			90%	90%	100%	90%	100%	100%	-	-	
5	Persentase Capaian Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			90%	90%	90%	90%	100%	100%	-	-	
6	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Ketertiban dan			90%	90%	90%	90%	100%	100%	-	-	

	Perlindungan Masyarakat											
7	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum			90%	90%	90%	90%	100%	100%	-	-	
8	Persentase desa yang sudah memiliki RPJMDes			80%	90%	90%	90%	90%	100%	-	-	
9	Persentase usulan musrenbang yang terakomodir			13,5%	15%	15%	30%	15%	16,7%	-	-	
10	Persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan			75%	80%	80%	80%	80%	85%	-	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kecamatan Tanjung Harapan sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik atau Pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Tanjung Harapan kepada masyarakat, merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan /atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kecamatan Tanjung Harapan. Kecamatan Tanjung Harapan berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan atau bahkan pelayanan yang diberikan diatas standar pelayanan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Tanjung Harapan didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dari berbagai disiplin ilmu. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Tanjung Harapan dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Tanjung Harapan:
 - a. Terbatasnya jumlah ASN dan Staf serta kurangnya SDM yang berkualitas di Kecamatan Tanjung Harapan sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Tanjung Harapan
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat kerja seperti komputer dan Laptop bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal.
 - c. Belum Maksimalnya sarana pendukung seperti Jaringan Internet yang belum sepenuhnya menjangkau wilayah kecamatan Tanjung Harapan dan Aliran Listrik yang belum maksimal 24 jam.
 - d. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Tanjung Harapan hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kab Paser.
 - e. Tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Tanjung Harapan.
 - f. Perlunya pembinaan kepada organisasi kepemudaan sebagai wadah berkumpulnya generasi penerus bangsa agar tidak salah arah yang tetap akan dilakukan secara berkesinambungan.
 - g. Pengelolaan Pemerintahan Desa yang belum teradministrasi dengan baik dan APBD Desa yang masih memerlukan penyempurnaan agar secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan.
 - h. Masih adanya keluarga miskin yang perlu untuk lebih diperhatikan melalui program – program pengentasan kemiskinan sehingga perlu fasilitasi kegiatannya.
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Soft Ware – Hard ware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan ;
- b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;
- d. Keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik, mempunyai Peluang untuk :
 - Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
 - Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;
 - Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan SDM terkait dengan penggunaan alat dan prosedur pelayanan yang baik untuk kepuasan masyarakat;
 - Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan TanjungHarapan terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

4. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pada tahun 2024 akan diadakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pada tahun 2024 diadakan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan cepat bagi masyarakat.

- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penanganan konflik Sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan agar terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pada tahun 2024 dilaksanakan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa untuk terlaksananya program prioritas yang ada di Desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan di Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rencana kerja PD tahun 2024.

- 2.4.1 Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur Bottom Up).
- 2.4.2 Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.
- 2.4.3 Untuk review terhadap RKPD tahun 2024 Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T-C.31 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 di bawah ini :

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2024

Kantor Camat Tanjung Harapan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	KECAMATAN					3.224.225.067						3.305.916.462	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	%	82	2.517.673.415	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	%	82	2.534.432.562	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	%	100	12.174.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	%	100	10.080.000	
			Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	%	65				Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	%	65		
			Persentase rata-rata capaian area perubahan RB PD	%	65				Persentase rata- rata capaian area perubahan RB PD	%	65		

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5.654.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5.040.000	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPR)	Dokumen	10	6.519.900	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPR)	Dokumen	10	5.040.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan ditindaklanjuti	%	100	2.313.275.372	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan ditindaklanjuti	%	100	2.215.631.063	
			Persentase LHP nihil	%	100				Persentase LHP nihil	%	100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanjung Harapan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	Orang/bulan	14	2.114.125.372	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanjung Harapan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	Orang/bulan	14	2.003.490.763	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	100	190.498.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (SPP,SPM,E-Billing)	Dokumen	100	207.100.300	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan rekonsiliasi keuangan:\	Laporan	2	8.652.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan rekonsiliasi keuangan	Laporan	2	5.040.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Persentase Rata-Rata Capaian IKI dengan Nilai < 80	Stel	26	11.700.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Persentase Rata-Rata Capaian IKI dengan Nilai < 80	Stel	26	15.120.000	
	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan		Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Stel	26	11.700.000	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan		Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Stel	26	15.120.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum PD yang Berjalan dengan Baik	%	100	105.993.553	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase rata2 capaian Indeks kepuasan sekretariat	%	100	226.541.499	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket	10	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanjung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket	10	3.750.000	

	n Bangunan Kantor		Kantor yang Disediakan					Harapan	Kantor yang Disediakan				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah ATK dan peralatan ruamh tangga yang disediakan	item	38	23.134.210	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah ATK dan peralatan ruamh tangga yang disediakan	item	38	26.386.499	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	9.115.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	8.850.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	85	61.413.733	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	85	187.555.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Jasa Penunjang Ueusan Pemerinta Daerah yang disediakan	%	112	28.030.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Jasa Penunjang Ueusan Pemerinta Daerah yang disediakan	%	112	28.560.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Surat menyurat yang terselesaikan	Dokumen	100	1.030.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Surat menyurat yang terselesaikan	Dokumen	100	1.200.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah bulan penyediaan Listrik, air Bersih dan Internet	bulan	12	27.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah bulan penyediaan Listrik, air Bersih dan Internet	bulan	12	27.360.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Presentase Jumlah BMD yang dipelihara	%	100	31.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Presentase Jumlah BMD yang dipelihara	%	100	38.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kendaraan Roda 4 (empat) sebagai Kendaraan Operasional Kantor yang dipelihara	Unit	2	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kendaraan Roda 4 (empat) sebagai Kendaraan Operasional Kantor yang dipelihara	Unit	2	35.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Peralatan kantor lainnya yang dipelihara	Unit	3	1.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Peralatan kantor lainnya yang dipelihara	Unit	3	3.500.000	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kec. Tanjung Harapan	Persentase Barang Inventaris Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Baik	Unit	2	15.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanjung Harapan	Persentase Barang Inventaris Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Baik	Unit	2	0	

	Pemerintah Daerah												
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	2	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	2	0	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Presentase Program Pembinaan Desa yang berjalan dengan baik	%	100	115.499.388	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Presentase Program Pembinaan Desa yang berjalan dengan baik	%	100	94.780.000	
8	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	7	115.499.388	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Desa yang terfasilitasi	Desa	7	94.780.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7	14.586.959	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7	26.047.500	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah rekomendasi pengelolaan	Dokumen	7	22.412.500	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Kec. Tanjung	Jumlah rekomendasi pengelolaan	Dokumen	7	17.930.000	

	Pendayagunaan Aset Desa		keuangan desa yang diterbitkan				Pendayagunaan Aset Desa	Harapan	keuangan desa yang diterbitkan				
	Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemenuhan PBB	Desa	7	21.115.000	Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemenuhan PBB	Desa	7	14.005.000	
	Fasilitasi/DSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah usulan Desa yang Terakomodir	Desa	7	38.980.350	Fasilitasi/DDSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah usulan Desa yang Terakomodir	Desa	7	22.447.500	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	2	18.404.579	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	2	14.350.000	

	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	82	78.561.000	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	82	110.353.500	
9	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Presentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan	%	100	23.895.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Presentase Penyelenggaraa n urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan	%	100	24.487.500	
	Koordinas/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Lapo ran	7	0	Koordinas/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tanju ng Harap an	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Laporan	7	16.447.500	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Dokumen Pelayanan Surat Pengantar/Reko mendasi	Doku men	140	23.895.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tanju ng	Jumlah Dokumen Pelayanan Surat	Dokumen	140	8.040.000	

	Tingkat Kecamatan							Harapan	Pengantar/Rekomendasi				
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	20.895.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	52.095.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Surat Pengantar/Rekomendasi Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dokumen	180	20.895.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Surat Pengantar/Rekomendasi Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dokumen	180	26.047.500	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Laporan	7	26.047.500	

								Wilayah Kecamatan					
11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada Camat	%	100	33.771.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada Camat	%	100	33.771.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Musibah yang tertangani/Kebak aran	Desa	7	13.161.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tanju ng Harap an	Jumlah Laporan Musibah yang tertangani/Keba karan	Desa	7	13.161.000	
			Jumlah UKS yang dibina	Desa	7	30.610.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tanju ng Harap an	Jumlah UKS yang dibina	Desa	7	30.610.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	%	60	317.113.913	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	%	60	386.525.000	

12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	11.246.413	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	13.120.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kegiatan forum Kerukunan beragama yang dilaksanakan	Kegiatan	1	11.246.413	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kegiatan forum Kerukunan beragama yang dilaksanakan	Kegiatan	1	13.120.000	
13	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	295.250.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	362.787.500	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kasus dan tindakan yang ditangani	bulan	12	295.250.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kasus dan tindakan yang ditangani	bulan	12	362.787.500	

	Negara Republik Indonesia												
14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	10.617.500	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	10.617.500	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tanjung Harapan	Pengawasan dan Penegakan Perda Perkada	Desa	7	10.617.500	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tanjung Harapan	Pengawasan dan Penegakan Perda Perkada	Desa	100	10.617.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	%	100	60.943.138	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	%	100	86.598.625	
15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	60.943.138	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	86.598.625	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kegiatan HUT RI yang dilaksanakan	Kegiatan	1	28.171.128	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kegiatan HUT RI yang dilaksanakan	Kegiatan	1	59.576.400	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrastu, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrastu, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	orang	35	22.584.785	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrastu, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrastu, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	orang	35	16.815.000	

	Regional, dan Nasional		Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi yang dilaksanakan	Kegiatan	1	10.207.225	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi yang dilaksanakan	Kegiatan	1	10.207.225	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan dengan baik	%	80	134.434.213	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan dengan baik	%	80	147.822.500	
16	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	%	100	134.434.213	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	%	100	147.822.500	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Desa yang dilaksanakan	Kegiatan	7	10.750.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Desa yang dilaksanakan	Kegiatan	7	10.750.000	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	104.834.213	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas, Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	118.222.500	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Desa yang melayani kegiatan Bantuan Sosial kepada Masyarakat Pra Sejahtera	Desa	7	18.850.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tanjung Harapan	Jumlah Desa yang melayani kegiatan Bantuan Sosial kepada Masyarakat Pra Sejahtera	Desa	7	18.850.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes. pada forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. PD Kecamatan Tanjung Harapan sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke PD terkait sebagaimana Tabel TC.32

Tabel TC-32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Besaran/ volume

Nihil

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Melihat dari Tujuan Kebijakan Nasional Pemerintah Republik Indonesia adalah melaksanakan reformasi birokrasi. Ada 4 tujuan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan antara lain:

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan area perubahan:
 - Manajemen perubahan (mind set dan culture set)
 - Penguatan pengawasan
 - Penguatan akuntabilitas kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan :
 - Penataan dan penguatan organisasi
 - Penataan sumber daya manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan :
 - Penataan peraturan penundang-undangan
 - Penataan tatalaksana
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan :
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (*publik*) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan

masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang **“menyentuh hati”** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari **“dilayani”** menjadi **“melayani”**.

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se indonesia.

Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2021 – 2026 dilaksanakan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip – prinsip tertentu, diantaranya : keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola

pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel yang akan berakibat langsung padamenurunnya kualitas pelayanan publik serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mengacu pada Renstra 2021-2026, Tujuan yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Misi ke 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang profesional, Partisipatif dan Transparan
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas
Sasaran : 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3) Meningkatnya Lingkungan yang Kondusif
- 2) Misi ke 4 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
Tujuan : Meningkatnya Kualitas hidup dan kesejahteraan yang merata
Sasaran : 1) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana kerja tahun 2024, program dan kegiatan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tanjung Harapan pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 050 tahun 2021 dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman. Berdasarkan Renstra 2021-2026 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA,

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 2) Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
12. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
 - 3) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan
 - 4) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - 5) Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Dari Program dan Kegiatan yang di Rencanakan pada Tahun 2024, adapun yang menjadi Program Prioritas bagi PD Kantor Camat Tanjung Harapan adalah:

Tabel 4.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Pemerintahan dilimpahkan Camat	Urusan yang kepada Pelaksanaan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan.

Pada tahun 2024 Kecamatan Tanjung Harapan bertepatan sebagai tuan rumah untuk Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Paser yang di ikuti oleh 10 Kecamatan Se-Kabupaten Paser.

4.2 MATRIKS PENDANAAN

Pada Rancangan Rencana Kerja dan Pendanaan PD Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026 . Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yaitu **MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA** dengan *tujuan* Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ukuran indikatornya adalah Meningkatnya Nilai SAKIP

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Tanjung Harapan menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan tangkas
2. Meningkatkan Kualitas hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Rencana Strategis tersebut ditetapkan 4 (Empat) sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3. Meningkatnya Lingkungan daerah yang Kondusif
4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tanjung Harapan pada dasarnya masih tetap mengacu dan pada tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman sedangkan untuk pendanaan bersumber dari Dana APBD tahun anggaran 2024.

Rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2024 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjung Harapan secara keseluruhan pada tahun 2024 terdiri dari 6 program, 14 kegiatan dan 29 sub kegiatan dan perkiraan maju untuk tahun 2024. untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel T-C.33 di bawah ini :

TABEL TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KABUPATEN PASER

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju RencanaTahun 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
7	01				KECAMATAN				3.305.916.462				3.273.354.514	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Kec. Tanjung Harapan	100 %	2.534.432.562	APBD		100 %	2.568.558.517	
7	01	001	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD	Kec. Tanjung Harapan	100%	10.080.000	APBD		100 %	14.250.000	
						Presentase Capaian Sasaran Strategis			90%				92%	
						Kualitas Pelaksanaan SPIP Perangkat Daerah			3				3	

						Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten		70				75	
						Persentase Rata-rata capaian Area Perubahan		65%				75%	
7	01	001	02.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanjung Harapan	5 Dokumen	5.040.000	APBD		5 Dokumen	6.750.000
7	01	001	02.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanjung Harapan	5 Laporan	10.680.000	APBD		5 Laporan	7.500.000
7	01	001	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan di tindaklanjuti	Kec. Tanjung Harapan	100 %	2.215.631.063	APBD		100 %	2.350.961.753
						Persentase LHP Nihil							
7	01	001	02.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanjung Harapan	144 Orang/bulan	2.003.490.763	APBD		11 Orang	2.145.837.253
7	01	001	02.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Tanjung harapan	12 Dokumen	207.100.300	APBD		12 Dokumen	196.212.940
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat	Kec. Tanjung Harapan	100 %	15.120.000	APBD	-	100 %	15.120.000

7	1	1	02.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi Kpegawaian	Kec. Tanjung Harapan	11 Dokumen	15.120.000	APBD	-	11 Dokumen	15.120.000
7	01	001	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat	Kec. Tanjung Harapan	100 %	273.901.499	APBD		100 %	111.871.764
7	01	001	02.06	0001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Tanjung Harapan	10 Paket	3.750.000	APBD		13 Paket	2.100.000
7	01	001	02.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tanjung Harapan	38 Paket	26.386.499	APBD		38 Paket	23.134.210
7	01	001	02.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Tanjung Harapan	5 Paket	8.850.000	APBD		5 Paket	10.542.654
7	01	001	02.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanjung Harapan	85 Laporan	234.915.000	APBD		85 Laporan	76.094.900
7	01	01	02.07		Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanjung Harapan	-	-	APDB		100 %	17.000.000
7	01	01	02.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kec. Tanjung Harapan	-	-	APBD		10 Unit	17.000.000

7	01	001	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat	Kec. Tanjung Harapan	100 %	28.560.000	APBD		100 %	28.910.000
7	01	001	02.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kec. Tanjung Harapan	1 laporan	1.200.000	APBD		1 Laporan	1.100.000
7	01	001	02.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanjung Harapan	12 Laporan	27.360.000	APBD		12 Laporan	27.810.000
7	01	001	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat	Kec. Tanjung Harapan	100%	38.500.000	APBD		100 %	47.445.000
7	01	001	02.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Tanjung Harapan	2 Unit	35.000.000	APBD		2 Unit	30.900.000
7	01	001	02.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Tanjung Harapan	3 Unit	3.500.000	APBD		3 Unit	1.545.000
7	01	001	02.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	Kec. Tanjung Harapan	-	-	APBD		1 Unit	15.000.000

7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berjalan dengan baik	Kec. Tanjung Harapan	74%	76.582.000	APBD		76 %	79.739.415
7	01	002	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	100%	24.487.500	APBD		100%	23.895.000
7	01	002	02.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Kec. Tanjung Harapan	7 Laporan	16.447.500	APBD		7 Laporan	16.447.500
7	01	002	02.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	140 Dokumen	8.040.000	APBD		150 Dokumen	23.895.000
7	01	002	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	83 %	77.095.000	APBD		72 %	20.895.000

7	01	002	02.02	0002	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	12 Laporan	26.047.500	APBD		72 %	20.895.000
7	01	002	02.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	7 Laporan	26.047.500	APBD		7 Laporan	26.047.500
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Tanjung Harapan	100 %	1.083.022.500	APBD		100%	34.949.415
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Kec. Tanjung Harapan	2 Laporan	1.083.022.500	APBD		7 Laporan	34.949.415
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan dengan Baik	Kec. Tanjung Harapan	100 %	87.335.000	APBD		100%	125.700.726

7	01	003	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Kec. Tanjung Harapan	100 %	87.335.000	APBD		100 %	125.700.726
7	01	003	02.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tanjung Harapan	4 Laporan	87.335.000	APBD		4 Laporan	125.700.726
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan dengan baik	Kec. Tanjung Harapan	60 %	375.907.500	APBD		65 %	321.870.621
7	01	004	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tanjung Harapan	100%	13.120.000	APBD		100%	12.750.000
7	01	004	02.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tanjung Harapan	1 Laporan	13.120.000	APBD		1 Laporan	12.750.000
7	01	004	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan penerapan penegakkan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	Kec. Tanjung Harapan	100 %	362.787.500	APBD		65 %	297.500.000

7	01	004	02.02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Tanjung Harapan	12 bulan	362.787.500	APBD		12 Bulan	297.500.000
						Jumlah Kasus dan tindakan yang ditangani							
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban umum yang berjalan dengan baik	Kec. Tanjung Harapan	100 %	141.391.400	APBD		100 %	61.857.285
7	01	005	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kec. Tanjung Harapan	100 %	141.391.400	APBD		100 %	51.676.906
7	01	005	02.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Kec. Tanjung Harapan	250 Orang	59.576.400	APBD		250 Orang	29.098.987

					Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
7	01	005	02.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Tanjung Harapan	35 Orang	81.815.000	APBD		35 orang	22.577.919
7	01	006			PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang berjalan dengan baik	Kec. Tanjung Harapan	100 %	94.780.000	APBD		100 %	117.231878
7	01	006	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	Kec. Tanjung Harapan	100 %	94.780.000	APBD		100 %	117.231.878
7	01	006	02.01	002	Failitasi Adminsitasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tanjung Harapan	7 Dokumen	26.047.500	APBD		7 Dokumen	12.263.698
7	01	006	02.01	009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Tanjung Harapan	7 Dokumen	22.447.500	APBD		7 Dokumen	38.980.350

					Daerah dengan Pembangunan Desa	dengan Pembangunan Desa							
7	01	006	02.01	015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Tanjung Harapan	2 Dokumen	14.350.000	APBD		2 Dokumen	21.404.580
TOTAL									4.471.451.462				3.273.354.514

BAB V

P E N U T U P

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) Kantor Kecamatan Tanjung Harapan pada Tahun 2024, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Sebagaimana Prioritas program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan, bahwa pada Tahun 2024 Kecamatan Tanjung Harapan akan menjadi tempat Pelaksanaan kegiatan MTQ Se-Kabupaten Paser maka perlu menjadi perhatian bahwa secara geografis, sarana dan prasarana penunjang yang ada di Tanjung Harapan memiliki keterbatasan dan juga ketersediaan Anggaran yang ada belum memadai.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Rencana tindak lanjut Kecamatan Tanjung Harapan pada tahun mendatang akan menetapkan 6 program sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2024 merupakan Dokumen Rencana Kerja sebagai syarat untuk melengkapi Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2024 dan Renja PD Tahun 2024.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2024 disusun, diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

Tanjung Aru, 13 Juli 2023


CAMAT

H. Sudarsono, SP. MP
NIP. 19700424 199803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Jalan M. Dachri Desa Tanjung Aru Kode Pos: 76261

Email : tanjungharapan7621@gmail.com Website : <http://kectanjungharapan.paserkab.go.id/>

SURAT KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG HARAPAN

NOMOR : 050/020/Kec.TH/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA)
KANTOR CAMAT TANJUNG HARAPAN
TAHUN 2023**

Menimbang : a. Bahwa Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah;

b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dalam tahap persiapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2023 dengan Keputusan Camat Tanjung Harapan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2006 -2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.
20. Peraturan Bupati Paser Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan.

Memperhatikan : -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada jalur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Renja Tahun 2023 pada Kecamatan Tanjung Harapan.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Aru
Tanggal : 09 Januari 2023

CAMAT

H. SUDARSONO, SP. MP

PembinaTK. I/IVB

NIP. 197004241998031010

Lampiran : Surat Keputusan Camat
Tanjung Harapan
Nomor : 050/020/Kec.TH/2023
Tanggal : 09 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

NO.	N A M A	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1	H. SUDARSONO, SP, MP	Camat	Ketua
2	AGUS SURYANTO, S.Sos	Sekretaris	Sekretaris
3	KRISTININGATI, SE	Kasubbag Perencanaan Program & Keuangan	Anggota
4	RAHMAT HIDAYAT	Staf Pelaksana Bagian Umum & Kepegawaian	Anggota
5	ABU BAKAR	Staf Pelaksana Bagian Perencanaan Program & Keuangan	Anggota
6	ANDI NUR IHSAN	PTT Bagian Umum Program & Keuangan	Anggota
7	SAHRA	PTT Bagian Perencanaan Program & Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Tanjung Harapan
Tanggal : 09 Januari 2023

CAMAT

H. SUDARSONO, SP, MP

Pembina TK.I/IV B

NIP. 197004241998031010